E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4622-4629
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Tagihan Bruto dan Piutang Retensi: Sinyal Risiko Likuiditas di Balik Pendapatan Perusahaan Konstruksi

Nurul Chalisa Majiding[1], Magfirah Wahyu Ramadhani[2], Dwi Utami[3]

[1,2,3] Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar
e-mail: nurul.chalisa.majiding@unm.ac.id

Abstrak

Perusahaan konstruksi mengakui pendapatan secara bertahap sehingga memegang klaim atas kas berupa tagihan bruto dan piutang retensi yang belum diterima. Klaim ini sering dibaca sebagai tanda risiko likuiditas, tetapi hubungan tersebut belum tentu berlaku. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil likuiditas empat emiten konstruksi, mengidentifikasi indikator yang membedakan emiten yang likuiditasnya terjaga dari yang tertekan, dan menilai peran klaim yang belum tertagih sebagai sinyal risiko likuiditas. Penelitian memakai pendekatan kualitatif-kuantitatif deskriptif dengan desain studi komparatif atas Adhi Karya, Paramita Bangun Sarana, Wijaya Karya, dan Waskita Karya. Data sekunder tahun 2025 dan 2024 diambil dari laporan keuangan tahunan 2025 yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia. Emiten diklasifikasikan menjadi terjaga atau tertekan berdasarkan rasio lancar, arus kas operasi, beban bunga terhadap laba bruto, dan ekuitas pemilik entitas induk. Hasil menunjukkan bahwa Paramita Bangun Sarana terjaga, Wijaya Karya dan Waskita Karya tertekan, sedangkan Adhi Karya terjaga hanya di ambang batas. Arus kas operasi, beban bunga terhadap laba bruto, dan ekuitas induk membedakan kedua kelompok dengan jelas, sedangkan rasio lancar hanya membedakan pada kasus ekstrem. Besarnya klaim yang belum tertagih tidak berurutan dengan kondisi emiten, sehingga tidak dapat dipakai sebagai sinyal tunggal. Simpulannya, tagihan bruto dan piutang retensi perlu dibaca bersama arus kas, beban bunga, dan struktur permodalan.

Kata Kunci: Tagihan Bruto, Piutang Retensi, Risiko Likuiditas, Emiten Konstruksi, Arus Kas Operasi

Abstract

Construction companies recognise revenue over time, so they hold claims on cash in the form of contract assets and retention receivables that have not yet been collected. These claims are often read as a sign of liquidity risk, but the relationship does not necessarily hold. This study aimed to describe the liquidity profiles of four listed construction companies, to identify the indicators that separate companies with sound liquidity from those under pressure, and to assess the role of uncollected claims as a liquidity risk signal. The study used a descriptive qualitative-quantitative approach with a comparative case design of Adhi

Karya, Paramita Bangun Sarana, Wijaya Karya, *and* Waskita Karya*. Secondary data were taken from the 2025 annual financial statements published through the Indonesia Stock Exchange. The companies were classified as sound or under pressure based on the current ratio, operating cash flow, interest expense relative to gross profit, and equity attributable to the parent. The results show that* Paramita Bangun Sarana *is sound,* Wijaya Karya *and* Waskita Karya *are under pressure, and Adhi Karya is sound only at the threshold. Operating cash flow, interest expense relative to gross profit, and parent equity clearly separate the two groups, whereas the current ratio separates them only in extreme cases. The size of uncollected claims does not follow the condition of the companies, so it cannot serve as a single signal. In conclusion, contract assets and retention receivables must be read together with cash flow, interest burden, and capital structure.*

Keywords: Contract Assets, Retention Receivables, Liquidity Risk, Construction Companies, Operating Cash Flow

LATAR BELAKANG

Perusahaan konstruksi mengerjakan proyek yang berjalan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, sehingga ada jeda waktu antara pelaksanaan pekerjaan, pengakuan pendapatan, dan penerimaan kas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72, yang selaras dengan IFRS 15 (International Accounting Standards Board, 2021), mengakui pendapatan kontrak jangka panjang secara bertahap (*over time*) mengikuti progres penyelesaian proyek, bukan saat kas diterima. Pendapatan yang sudah diakui tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja, sedangkan pembayaran yang ditahan pemberi kerja sebagai jaminan mutu dicatat sebagai piutang retensi, yang baru dapat dicairkan setelah masa pemeliharaan berakhir (Martani et al., 2021). Keduanya sah menurut standar, tetapi sama-sama merupakan klaim atas kas yang belum diterima.

Karena itu, besarnya klaim tersebut sering dibaca sebagai tanda risiko likuiditas. Namun data emiten konstruksi di Indonesia menunjukkan gambaran yang lebih rumit. PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada 2025 mencatat tagihan bruto Rp5,98 triliun dan piutang retensi Rp1,05 triliun, yang bersama-sama setara 42,3% aset lancar, dengan 51,4% tagihan bruto berasal dari pihak berelasi. Perusahaan membukukan rugi Rp5,60 triliun dan rasio lancar 0,85, tetapi arus kas operasinya tetap positif Rp1,96 triliun (PT Adhi Karya, 2026). Sebaliknya, PT Paramita Bangun Sarana Tbk (PBSA) mencatat arus kas operasi positif Rp367,03 miliar dan rasio lancar 2,48 (PT Paramita Bangun Sarana Tbk, 2026).

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) pada 2025 mencatat rugi Rp10,14 triliun, arus kas operasi negatif Rp348,04 miliar, dan penurunan rasio lancar dari 1,59 menjadi 1,29. Beban bunganya Rp2,97 triliun, jauh di atas laba kotor Rp1,13 triliun (PT Wijaya Karya, 2026). PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada 2025 mencatat rasio lancar 0,51, arus kas operasi negatif Rp559,71 miliar, dan ekuitas pemilik entitas induk negatif Rp1,03 triliun (PT Waskita Karya, 2026). Keempat emiten sama-sama mengakui pendapatan secara bertahap

dan sama-sama memegang klaim atas kas yang belum diterima, tetapi kondisi likuiditasnya berbeda.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan: kapan klaim yang belum tertagih benar-benar menjadi sinyal risiko likuiditas, dan indikator apa yang membedakan emiten konstruksi yang likuiditasnya terjaga dari yang tertekan? Jika tagihan bruto dan piutang retensi dibaca sendirian, investor dan pemangku kepentingan bisa salah menilai, baik terlalu khawatir pada emiten yang kasnya sehat maupun terlalu tenang pada emiten yang sudah tertekan. Penelitian ini membandingkan keempat emiten untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kondisi likuiditas PBSA, Adhi Karya, WIKA, dan Waskita berdasarkan arus kas operasi, rasio lancar, beban bunga, dan struktur permodalan. Kedua, indikator apa yang membedakan emiten yang likuiditasnya terjaga dari yang tertekan. Ketiga, apakah besarnya klaim yang belum menjadi kas (tagihan bruto dan piutang retensi) membedakan kedua kelompok tersebut.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil likuiditas keempat emiten, mengidentifikasi indikator yang membedakan kelompok terjaga dan tertekan, dan menilai peran klaim yang belum tertagih sebagai sinyal risiko likuiditas.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif-kuantitatif deskriptif dengan desain studi komparatif pada empat emiten konstruksi. Pendekatan deskriptif dipilih karena tujuan penelitian adalah menggambarkan kondisi likuiditas dan membandingkannya antaremiten, bukan menguji hubungan sebab-akibat (Sukmadinata, 2015). Perbandingan antarkasus dipakai untuk menemukan pola yang membedakan emiten yang likuiditasnya terjaga dari yang tertekan (Yin, 2018). Jumlah objek yang kecil membuat penelitian ini tidak menggunakan uji statistik inferensial.

Objek penelitian adalah empat emiten konstruksi yang mengakui pendapatan secara bertahap berdasarkan PSAK 72, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Paramita Bangun Sarana Tbk (PBSA), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Periode yang dianalisis adalah tahun 2025 sebagai periode utama dan tahun 2024 sebagai pembanding. Pemilihan objek memakai *purposive sampling* dengan tiga kriteria: (a) bergerak di bidang jasa konstruksi, (b) mengakui pendapatan kontrak secara bertahap berdasarkan PSAK 72, dan (c) laporan keuangan auditnya tersedia untuk publik. Keempatnya mewakili tiga badan usaha milik negara dan satu emiten swasta, sehingga pembandingan mencakup dua kelompok kepemilikan.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan 2025 keempat emiten yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia, dalam format PDF dan, untuk PBSA dan WIKA, juga xlsx. Angka 2024 diambil dari kolom pembanding pada laporan 2025 tersebut. Seluruh angka dikonversi ke satuan rupiah penuh sebelum dihitung, karena laporan WIKA disajikan dalam ribuan rupiah. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu mencatat pos-pos dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, serta studi pustaka atas standar dan literatur. Pos yang dicatat meliputi pendapatan, laba bruto, laba (rugi) tahun berjalan, beban bunga dan keuangan, arus kas bersih dari aktivitas

operasi, aset lancar, liabilitas jangka pendek, total liabilitas, ekuitas pemilik entitas induk dan total ekuitas, serta tagihan bruto, piutang retensi, dan piutang lainnya.

Indikator yang dihitung meliputi rasio lancar, beban bunga terhadap laba bruto, dan liabilitas terhadap ekuitas, yang dirumuskan pada Persamaan (1) sampai (3), ditambah arus kas operasi dan ekuitas induk. Rasio lancar menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, beban bunga terhadap laba bruto menunjukkan beban utang terhadap kemampuan operasional, dan liabilitas terhadap ekuitas menunjukkan tingkat ketergantungan pada utang. Arus kas operasi adalah arus kas bersih aktivitas operasi sebagai ukuran kas yang dihasilkan operasi inti, sedangkan ekuitas induk adalah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebagai ukuran ketahanan permodalan.

$$\text{Rasio lancar} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Liabilitas jangka pendek}} \quad (1)$$

$$\text{Beban bunga terhadap laba bruto} = \frac{\text{Beban bunga dan keuangan}}{\text{Laba bruto}} \quad (2)$$

$$\text{Liabilitas terhadap ekuitas} = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total ekuitas}} \quad (3)$$

Klaim atas kas yang belum diterima diukur dengan intensitas klaim, yaitu porsi aset lancar yang masih berupa tagihan bruto dan piutang retensi (Persamaan 4). Rincian tersebut hanya tersedia langsung pada ADHI. Pada PBSA, WIKA, dan WSKT laporan yang diperoleh tidak memuat rincian itu, sehingga digunakan proksi berupa piutang lainnya (Persamaan 5).

$$\text{Intensitas klaim} = \frac{\text{Tagihan bruto} + \text{Piutang retensi}}{\text{Aset lancar}} \quad (4)$$

$$\text{Intensitas klaim (proksi)} = \frac{\text{Piutang lainnya}}{\text{Aset lancar}} \quad (5)$$

Proksi ini diduga memuat tagihan bruto dan retensi, tetapi bisa juga memuat piutang jenis lain. Karena itu, intensitas klaim ADHI dan proksi emiten lain tidak dibandingkan secara langsung, dan hanya dibaca sebagai arah.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, emiten diklasifikasikan menjadi terjaga atau tertekan berdasarkan empat kriteria: (1) rasio lancar kurang dari 1, (2) arus kas operasi negatif, (3) beban bunga dan keuangan melebihi laba bruto, dan (4) ekuitas pemilik entitas induk negatif. Emiten diklasifikasikan tertekan jika memenuhi dua kriteria atau lebih, dan terjaga jika memenuhi kurang dari dua. Untuk menguji ketahanan klasifikasi, hasil juga dibandingkan jika batasnya diubah menjadi satu atau tiga kriteria. Intensitas klaim sengaja tidak dimasukkan sebagai kriteria, supaya rumusan masalah ketiga dapat dijawab secara independen dan tidak melingkar.

Analisis dilakukan dalam empat tahap: (1) reduksi data, yaitu memilih dan mengonversi pos laporan keuangan ke satuan yang seragam, (2) penghitungan indikator untuk setiap emiten dan periode, (3) klasifikasi dan perbandingan, yaitu menerapkan kriteria di atas, menyusun matriks indikator, lalu membandingkan kedua kelompok, dan (4) interpretasi pola, khususnya apakah intensitas klaim berbeda antarkelompok, dengan merujuk pada PSAK 72 dan literatur. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dokumen (mencocokkan angka PDF dengan xlsx pada WIKA dan PBSA serta memeriksa pembanding antarperiode), triangulasi teori (menafsirkan temuan dengan PSAK 72 dan literatur), konsistensi satuan dan periode, serta uji ketahanan klasifikasi dengan mengubah batas jumlah kriteria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 merangkum data dasar tahun 2025. Seluruh angka dalam miliar rupiah dan berasal dari laporan keuangan tahunan emiten.

Tabel 1. Data dasar tahun 2025 (Rp miliar)

Pos	Adhi Karya	PBSA	WIKA	Waskita
Pendapatan	9.666,0	1.591,2	13.325,5	8.816,8
Laba bruto	1.049,5	298,8	1.127,3	1.579,7
Laba (rugi) tahun berjalan	−5.596,7	320,1	−10.135,2	−4.484,2
Beban bunga dan keuangan	865,3	1,3	2.968,1	4.003,0
Arus kas operasi	1.964,5	367,0	−348,0	−559,7
Aset lancar	16.617,9	1.190,9	20.065,9	16.891,8
Liabilitas jangka pendek	19.458,1	481,0	15.513,3	33.104,5
Total liabilitas	25.496,6	492,7	48.461,8	67.062,0
Total ekuitas	3.297,3	929,2	1.685,3	3.671,6
Ekuitas pemilik entitas induk	2.865,5	928,5	−884,7	−1.032,3

Sumber: PT Adhi Karya (2026); PT Paramita Bangun Sarana Tbk (2026); PT Wijaya Karya (2026); PT Waskita Karya (2026).

Pendapatan Adhi Karya turun 27,6% dari Rp13,35 triliun, dan total ekuitasnya turun 63,3% akibat kerugian tahun berjalan.

Tabel 2 menyajikan hasil perhitungan indikator likuiditas dan permodalan. Rasio lancar keempat emiten menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi tingkat penurunannya berbeda jauh. Waskita turun paling tajam (0,91 ke 0,51) dan Adhi Karya jatuh di bawah 1 (1,10 ke 0,85), sedangkan PBSA turun tipis. Beban bunga Adhi Karya naik hingga 82% dari laba bruto (2024: 51%), dan ketergantungannya pada utang melonjak dari 2,86× menjadi 7,73× karena ekuitas menyusut sementara liabilitas hampir tidak berubah.

Tabel 2. Hasil perhitungan indikator

Indikator	Adhi Karya	PBSA	WIKA	Waskita
Rasio lancar (tahun lalu)	0,85 (1,10)	2,48 (2,67)	1,29 (1,59)	0,51 (0,91)
Arus kas operasi	positif	positif	negatif	negatif
Beban bunga ÷ laba bruto	0,82×	0,004×	2,63×	2,53×
Ekuitas induk	positif	positif	negatif	negatif
Total liabilitas ÷ total ekuitas	7,73×	0,53×	28,76×	18,27×

Ekuitas induk WIKA berubah dari positif Rp8,87 triliun menjadi negatif Rp884,7 miliar, dan Waskita dari positif Rp2,81 triliun menjadi negatif Rp1,03 triliun. Pada keduanya, total liabilitas melampaui ekuitas lebih dari 18 kali lipat.

Hasil klasifikasi berdasarkan empat kriteria disajikan pada Tabel 3. Menurut aturan pada bagian Metode, Adhi Karya tetap terklasifikasi terjaga karena hanya memenuhi satu kriteria. Namun klasifikasi ini tidak tahan uji: jika batas diturunkan menjadi satu kriteria, Adhi Karya masuk kelompok tertekan. Aturan ini juga tidak menangkap rugi bersih Rp5,60 triliun, karena kriteria rugi tidak ada di dalamnya. Adhi Karya karenanya paling tepat dibaca sebagai emiten di ambang batas, bukan sepenuhnya sehat. Untuk PBSA, WIKA, dan Waskita, klasifikasi sama pada batas satu, dua, maupun tiga kriteria.

Tabel 3. Pemenuhan kriteria (Ya = terpenuhi)

Kriteria	Adhi Karya	PBSA	WIKA	Waskita
Rasio lancar < 1	Ya	–	–	Ya
Arus kas operasi negatif	–	–	Ya	Ya
Beban bunga > laba bruto	–	–	Ya	Ya
Ekuitas induk negatif	–	–	Ya	Ya
Jumlah kriteria	1	0	3	4
Klasifikasi (batas ≥ 2)	Terjaga, di ambang	Terjaga	Tertekan	Tertekan

Rasio lancar saja tidak cukup membedakan. WIKA (1,29) memiliki rasio lancar lebih tinggi daripada Adhi Karya (0,85), tetapi masuk kelompok tertekan karena arus kas operasi negatif, beban bunga yang melampaui laba bruto, dan ekuitas induk negatif.

Intensitas klaim terhadap aset lancar disajikan pada Tabel 4. Rincian langsung Adhi Karya adalah tagihan bruto Rp5,98 triliun (turun 23,5%), piutang retensi Rp1,05 triliun (turun 12,3%), dan 51,4% tagihan bruto berasal dari pihak berelasi (2024: 58,6%) (PT Adhi Karya, 2026). Angka 2024 adalah angka yang disajikan kembali. Untuk tiga emiten lain, angka yang tersedia adalah proksi piutang lainnya, sehingga perbandingannya hanya dibaca sebagai arah.

Tabel 4. Intensitas klaim terhadap aset lancar

	Adhi Karya	PBSA	WIKA	Waskita
Jenis data	langsung	proksi	proksi	proksi
Intensitas klaim (tahun lalu)	42,3% (40,7%)	24,4% (31,8%)	23,4% (22,4%)	15,4% (10,9%)
Kelompok	Terjaga, di ambang	Terjaga	Tertekan	Tertekan

Intensitas klaim tidak berurutan dengan kondisi emiten. Adhi Karya memiliki intensitas tertinggi dan berada di ambang, Waskita memiliki yang terendah tetapi tertekan, dan proksi PBSA (24,4%) hampir sama dengan WIKA (23,4%) meski kondisinya berlawanan. Dengan Adhi Karya di ambang, data tidak mendukung pernyataan bahwa klaim besar tidak berbahaya. Yang dapat dikatakan hanyalah bahwa ukuran klaim saja tidak menjelaskan

perbedaan kondisi antaremiten. Temuan ini sejalan dengan sifat pengakuan pendapatan bertahap menurut PSAK 72, yang memisahkan waktu pengakuan pendapatan dari waktu penerimaan kas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Pada Adhi Karya, klaim (tagihan bruto dan retensi) turun sekitar Rp1,99 triliun, hampir setara dengan arus kas operasi Rp1,96 triliun. Ini konsisten dengan arus kas yang ditopang pencairan klaim, tetapi hubungan sebab-akibatnya tidak dapat dipastikan dari data ini. Kerugian Adhi Karya tampaknya tidak berasal dari kas operasi, karena arus kas operasinya positif. Sifat beban lainnya sebesar Rp4,84 triliun perlu ditelusuri sebelum ditafsirkan.

Secara ringkas, dua emiten tergolong tertekan (WIKA dan Waskita), satu terjaga (PBSA), dan satu terjaga di ambang (Adhi Karya). Indikator yang paling jelas membedakan adalah arus kas operasi, beban bunga terhadap laba bruto, dan ekuitas induk. Rasio lancar membedakan hanya pada kasus ekstrem, dan pada Adhi Karya ia menjadi satu-satunya sinyal. Besarnya klaim yang belum tertagih tidak berurutan dengan kondisi emiten, dan pada Adhi Karya klaim terbesar bersamaan dengan kondisi yang memburuk, sehingga klaim besar tidak dapat dianggap aman.

Temuan ini perlu dibaca dengan beberapa keterbatasan. Hanya Adhi Karya yang memiliki data langsung tagihan bruto dan piutang retensi, sedangkan emiten lain memakai proksi yang belum tentu merepresentasikan klaim secara murni. Angka pembanding 2024 pada laporan 2025 disajikan kembali oleh emiten, sehingga dapat berbeda dari laporan 2024 yang semula diterbitkan. Empat emiten tidak memungkinkan generalisasi ke seluruh industri konstruksi. Kriteria klasifikasi dirumuskan setelah peneliti mengenal profil data keempat emiten, sehingga klasifikasi bersifat deskriptif dan bukan uji prediktif. Beberapa kriteria juga saling berkaitan (misalnya rugi besar dapat menyebabkan ekuitas negatif), dan kriteria tidak memuat rugi bersih, sehingga emiten dengan kerugian besar tetapi kas operasi positif dapat terklasifikasi terjaga. Terakhir, penelitian tidak memuat catatan atas laporan keuangan untuk PBSA, WIKA, dan WSKT, sehingga umur piutang dan kebijakan penurunan nilai tidak ditelaah.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa likuiditas Paramita Bangun Sarana terjaga, Wijaya Karya dan Waskita Karya tertekan, sedangkan Adhi Karya terjaga hanya di ambang batas. Arus kas operasi, beban bunga terhadap laba bruto, dan ekuitas induk lebih tegas membedakan kedua kelompok daripada rasio lancar. Besarnya tagihan bruto dan piutang retensi tidak berurutan dengan kondisi emiten, sehingga tidak layak dipakai sebagai sinyal tunggal risiko likuiditas. Investor dan kreditur disarankan menilai klaim bersama arus kas, beban bunga, dan struktur permodalan. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak emiten dan menelaah catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. 2023. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Jakarta: IAI.

International Accounting Standards Board. 2021. IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers. London: IASB.

Martani, D., Siregar, S.V., Wardhani, R., Farahmita, A. & Tanujaya, E. 2021. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 2026. Laporan Keuangan Tahunan 2025. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
PT Paramita Bangun Sarana Tbk. 2026. Laporan Keuangan Tahunan 2025. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 2026. Laporan Keuangan Tahunan 2025. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2026. Laporan Keuangan Tahunan 2025. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono & Lestari, P. (2021). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata, N.S. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Yin, R.K. 2018. Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.